

# ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT LIKUIDITAS BPR KONVENSIONAL DAN BPR SYARIAH GUNA MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI PADA BPR DI KABUPATEN MAGETAN DAN PONOROGO)

Anggita Langgeng Wijaya<sup>1)</sup>, Yulin Suswandari<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI MADIUN  
email: Gonggeng14@gmail.com

<sup>2)</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI MADIUN  
email: Tugas2q@gmail.com

## *Abstract*

*This study is aimed to analyze the differences in the level of liquidity in Conventional Rural Banks and Islamic Rural Banks to determine the level of financial health of rurals banks in Magetan and Ponorogo East Java. Analyses were performed by t-test on liquidity ratio and cash ratio from periods 2010 until 2013. Population in this study are all of Rural banks (BPR) in Magetan and Ponorogo officially registered in Bank Indonesia. Data were obtained from the Quarterly financial report. The results of this research show that: 1) there are significant differences in terms of the liquidity ratio between Conventional Rural banks and Islamic Rural Bank at Magetan dan Ponorogo. Conventional Rural Banks have a higher liquidity ratio than Islamic Rural banks. 2) There are significant differences interms of the ratio of cash between conventional Rural Banks and Islamic Rural Bank in Magetan and Ponorogo. Conventional Rural Banks have a lower cash ratio than Islamic Rural Banks in Magetan and Ponorogo.*

**Keywords:** *Conventional Rurals Bank, Islamic Rurals Bank, T-test, Magetan, Ponorogo*

## 1. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi pokok berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain, juga menjamin keamanan uang masyarakat yang disimpan tersebut dari risiko hilang, kebakaran, dan lain- lain. Bank memperoleh sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan sebagainya yang mana dana yang telah dihimpun tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat, terutama pada dunia usaha dalam bentuk kredit. Dalam hal ini, bank memperoleh pendapatan atau penghasilan dari perbedaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, yaitu antara tingkat bunga yang dibebankan atas kredit yang diberikan bank kepada debitur dengan tingkat bunga yang diberikan bank atas uang yang disimpan pada bank tersebut (Kalesaran, 2013).

Handan dan Wijaya (2006) mengatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut

UU RI nomor 10 tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Islamiyah (2010), Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang (rentenir). Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat perdesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

Jikrillah (2010) menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan komponen kunci dalam memajukan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Birokrasi rumit yang biasanya menjadi hambatan utama UMKM dalam memperoleh akses pendanaan, banyak didapatkan solusinya melalui layanan Bank Perkreditan Rakyat. Proses layanan kredit yang sederhana dan mudah, membuat Bank Perkreditan Rakyat makin dipercaya oleh pelaku

UMKM. Peran penting yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat terhadap UMKM ini, sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjadikan usaha menengah kecil dan mikro sebagai ujung tombak pertumbuhan perekonomian nasional. Sehubungan dengan perannya yang sangat strategis dan berbeda dengan perbankan secara umum, maka industri Bank Perkreditan Rakyat dengan tingkat efisiensi yang tinggi sangat diperlukan karena mempunyai dampak positif terhadap sektor-sektor lainnya

Peranan BPR sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat mewujudkan tujuan BPR, yaitu sebagai lembaga keuangan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Islamiyah, 2010). Sasaran Bank Perkreditan Rakyat ialah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir (Jakrillah, 2010).

Memperhatikan peranan BPR yang sangat penting bagi masyarakat menengah ke bawah, peneliti menilai perlu dilakukan penelitian tentang kesehatan keuangan perbankan sebagai upaya perlindungan konsumen dari praktik perbankan yang tidak sehat. Menurut Jakrillah (2010), pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara periodik bank-bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan dan kinerjanya. Bank-bank dituntut transparan dengan kewajiban untuk menyediakan informasi kepada pihak nasabah baik yang berhubungan transaksi yang dilakukan oleh nasabah ataupun informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank, sehingga kinerja perbankan dapat diketahui oleh segala pihak yang berkepentingan dengan bank yang bersangkutan.

Namun demikian hal yang menjadi kendala adalah pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia tidak secara langsung dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat belum dapat secara langsung menilai tingkat kesehatan BPR yang ada di wilayah mereka. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kondisi keuangan BPR baik BPR konvensional maupun BPR

Syariah. Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan adalah rasio likuiditas perbankan. Harahap (2010) menyatakan bahwa likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank karena akan berdampak pada profitabilitas serta *business sustainability and continuity*. Hal tersebut tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund out flow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*).

Perkembangannya bisnis lembaga keuangan syariah juga berdampak pada kemunculan lembaga keuangan di daerah termasuk munculnya Bank Perkreditan Rakyat dengan basis syariah. Kemunculan BPR syariah ini menjadi kajian yang menarik dalam penelitian terutama tentang bagaimana kondisi keuangan BPR syariah jika dibandingkan dengan BPR konvensional. Kabupaten Magetan dan Ponorogo dipilih sebagai sampel penelitian ini dikarenakan Kabupaten Magetan dan Ponorogo di eks-karisidenan Madiun yang memiliki BPR konvensional dan BPR Syariah dalam satu kabupaten dan terdaftar secara resmi di Bank Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Undang-Undang No. 10 ayat (2) tanggal 10 november 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kalesaran, 2013). Margaretha dan Setiyaningrum (2011) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi ini disebut dengan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi

dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tersebut, yaitu penyimpan dana dan peminjam dana saling memiliki kepercayaan. Bank yang sehat merupakan penunjang bagi perkembangan perekonomian nasional. Salah satu aspek penting untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah likuiditas keuangan bank.

Muhammad dan Nugraheni (2011) menyebutkan bahwa industri keuangan syariah telah menjadi sebuah potensi yang besar dalam bisnis global. Di Indonesia, perkembangan lembaga syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Sementara lembaga keuangan non bank seperti Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan nirlaba seperti Lembaga Amil Zakat dan Badan Pengelola Wakaf juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Anwar (2010) menjelaskan bahwa di Indonesia pada tahun 2010, telah ada lebih dari lima belas bank yang memiliki sistem operasi ganda, yaitu menjalankan aktivitas sebagai bank konvensional dan juga menjalankan sistem perbankan syariah.

Siregar (2002) menyatakan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua UU tersebut telah amanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia. UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking system di Indonesia, yaitu adanya dua system perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Ismal (2009) menjelaskan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia merup-

kan hal yang sangat prospektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kinerja pada dua dekade terakhir. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perbankan syariah untuk memiliki manajemen likuiditas perusahaan yang cukup dalam rangka mengoptimalkan dana nasabah dan mengurnagi risiko likuiditas. Masalah likuiditas dalam sebuah bank pada umumnya terjadi karena kegagalan dalam pengelolaan dana nasabah atau karena kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan. Aspek likuiditas dapat dijaga dengan cara meningkatkan manajemen internal likuiditas dengan menyeimbangkan neraca pada sisi aktiva lancar dan hutang lancar atau dengan mengoptimalkan peran bank sentral dalam hal manajemen likuiditas industri perbankan.

Herri *et al.* (2008) menyatakan bahwa BPR adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR meliputi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembinaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Handan dan Wijaya (2006) menjelaskan bahwa tugas pokok BPR adalah mengembangkan perekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Yuniarti (2011) persaingan penyaluran kredit di segmen nasabah UMKM, dirasakan semakin ketat. Pasca krisis keuangan global, bank swasta dan bank BUMN berebut membiayai nasabah segmen ini yang selama ini dikuasai bank perkreditan rakyat (BPR) dan Bank BRI. Tantangan BPR saat ini dinilai akan semakin berat. Pasalnya saat ini tidak hanya BPR yang menggarap pasar UMKM namun perbankan umum, dan asing. Saat ini sebanyak 1.627 BPR yang beroperasi di seluruh Indonesia terancam gulung tikar akibat persaingan yang tidak seimbang antara BPR dengan bank-bank

umum dan asing. BPR sudah dirugikan oleh kemudahan yang diberikan BI kepada ekspansi bank umum melalui pembukaan kantor cabang pembantu (capem) di kota-kota kecil. Capem-capem itu notabene sebenarnya membidik segmen nasabah yang selama ini digarap BPR. Sebaliknya, BPR selama ini dibatasi oleh regulasi BI yang hanya boleh buka satu cabang dalam satu tahun. Aturan ini tidak berlaku untuk bank (Yuniarti, 2011).

Astuti dan Sudyatno (1995) menyatakan bahwa krisis likuiditas bagi sebuah bank adalah hal yang berbahaya karena dapat berdampak pada kesulitan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan. Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya pada tingkat yang optimal. Krisis likuiditas bagi sebuah bank menjadi lebih berbahaya dampaknya dari pada pelayanan yang kurang baik terhadap nasabah. Nama baik perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun dapat hancur karena kegagalan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Aspek likuiditas perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari jajaran top manajemen bank serta Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.

Likuidasi perbankan yang terjadi pada periode 1997-1998, ditutupnya bank IFI dan kasus fenomenal bank Century menjadi catatan kelam bagi perkembangan perbankan Indonesia sekaligus menjadi *red flag* bagi bank Indonesia tentang pentingnya aspek likuiditas sebagai penentu tingkat kesehatan bank. Syathiri (2009) menjelaskan bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah di Indonesia, masing-masing tetap berorientasi pada upaya untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas operasionalnya bank harus dapat menjaga kinerja keuangannya terutama tingkat profitabilitas dan likuiditas. Menjaga likuiditas bank sama juga dengan menjaga kelangsungan hidup bank. Bank yang terkena krisis likuiditas akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan dampak berdampak pada kebangkrutan bank tersebut.

Kasus Bank Century yang menyeret politisi dan para pejabat di bidang keuangan merupakan salah satu contoh kasus perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Kesalahan dalam menilai tingkat likuiditas sebuah bank dapat berdampak pada keputusan bisnis yang tidak tepat baik oleh investor maupun otoritas bank sentral. Penelitian ini menarik dilakukan mengingat perkembangan yang cukup pesat pada perbankan syariah di Indonesia dan pentingnya aspek likuiditas sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan

perbankan, sehingga penelitian yang membandingkan likuiditas antara BPR syariah dan BPR konvensional menjadi penting untuk dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank di daerah.

Ika dan Abdullah (2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan yang signifikan dari perbankan syariah pada beberapa dekade ini memunculkan kesempatan bagi para akademisi untuk mengembangkan penelitian dibidang akuntansi syariah. Salah satu metoda yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan untuk menilai beberapa aspek dari bank syariah seperti kinerja, likuiditas dan risiko kredit. Kamaruddin *et al.* (2008) melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja perbankan di Malaysia jika dilihat dari efisiensi pengendalian biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya pada *islamic bank* lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank domestik dan bank asing yang ada di Malaysia.

Penelitian Siebel (2008) menemukan bahwa perbankan Islam di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik jika dilihat dari sisi rasio hutang dan kualitas tingkat pengembalian portofolio dibandingkan dengan bank komersial lain secara umum. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan aspek likuiditas. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dan apakah bank syariah memiliki likuiditas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hasil penelitian Ika dan Abdullah (2011) menunjukkan bahwa selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara keuangan bank syariah memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Dengan memperhatikan beberapa hasil penelitian di atas, serta dengan memperhatikan kemunculan BPR syariah di Kabupaten Magetan dan Ponorogo, peneliti ingin mengetahui perbandingan tingkat likuiditas keuangan antara BPR konvensional dan BPR syariah. Perkembangan pesat dalam industri keuangan syariah, berdampak kepada banyaknya konsumen yang mulai beralih menggunakan jasa keuangan syariah termasuk BPR. Tingkat likuiditas keuangan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup sebuah bank, sehingga pemahaman tentang likuiditas BPR syariah dan BPR konvensional penting untuk dilakukan.

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan oleh beberapa hal, antara lain masalah

tingkat likuiditas menjadi isu besar nasional yang berdampak pada munculnya kasus bank Century. Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo, adalah wilayah dengan perkembangan BPR konvensional dan BPR Syariah yang baik dan telah secara resmi terdaftar di Bank Indonesia. BPR konvensional telah lebih dahulu ada di masyarakat dibandingkan dengan BPR syariah, secara dasar pemikiran, keuangan BPR konvensional memiliki tingkat kesehatan keuangan yang lebih baik termasuk tingkat likuiditas perusahaan jika dibandingkan dengan BPR syariah. Namun demikian, dari sisi yang berlawanan, perkembangan pesat industri syariah dapat berpengaruh pada minat konsumen untuk menggunakan jasa BPR konvensional dan beralih ke BPR syariah. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan BPR konvensional dan meningkatkan kinerja keuangan BPR syariah yang dapat berdampak terhadap tingkat rasio likuiditas masing-masing bank. Berdasar hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang tingkat likuiditas BPR konvensional dan BPR syariah serta analisis tingkat perbedaan likuiditas BPR konvensional dan BPR syariah.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$H_1$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara BPR konvensional dan BPR syariah dalam hal tingkat likuiditas dari sisi *current ratio*

$H_2$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara BPR konvensional dan BPR syariah dalam hal tingkat likuiditas dari sisi *cash ratio*.

## 2. METODE PENELITIAN

### Data, Populasi dan Sampel

Data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan Triwulanan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR syariah dan BPR konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Sampel diambil dengan menggunakan *metoda* sampel populasi.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah tingkat *likuiditas*. Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *current ratio* dan *cash ratio* dengan mengacu pada penelitian Ika dan Abdullah (2011). *Current ratio* dan *cash ratio* dalam penelitian ini dinotasikan dengan rumus sebagai berikut.

$$Current\ Ratio = \frac{Hutang\ segera}{Saldo\ kas}$$

$$Cash\ ratio = \frac{Saldo\ kas}{Total\ aktiva}$$

Variable kedua dalam penelitian ini adalah kategori bank dimana dalam penelitian ini penulis membentuk *variable dummy* yaitu nilai 1 untuk BPR syariah dan nilai 0 untuk BPR konvensional.

### Metoda Analisis Data

#### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tingkat likuiditas *BPR syariah dan BPR konvensional di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo dari sisi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi*.

#### Uji Beda

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan uji beda. Alat analisis yang digunakan adalah uji *Mann-Whitney*. Melalui penelitian ini akan diuji apakah terdapat perbedaan *likuiditas yang signifikan antara BPR syariah dan BPR konvensional di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo*. Menurut Santoso (2006) jika nilai  $p$  di bawah 0.05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara dalam hal tingkat likuiditas antara BPR syariah dan BPR konvensional di Kab. Magetan dan Kab. Ponorogo. Tabel *mean rank* pada *output* olah data akan menunjukkan mana likuiditas yang lebih tinggi antara BPR syariah dan BPR konvensional *di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo*. Uji beda akan dilakukan untuk seluruh sampel dan juga analisis sampel berdasar kabupaten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran tentang karakter dasar dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan pembahasan statistik deskriptif ditujukan untuk mengetahui persbaran data penelitian dilihat dari sisi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pembahasan statistic deskriptif dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama, data kabupaten keuangan BPR di Magetan, yang kedua, data keuangan BPR di Kabupaten Ponorogo dan yang ketiga, data total penelitian yang meliputi data keuangan BPR kabupaten Magetan dan Ponorogo. Adapun hasil uji statistik deskriptif untuk data keuangan BPR di kabupaten Magetan tersaji pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 1. Data Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DUMM YBPR	147	0	1	0.12	0.321
LIQ	147	0.00	9.14	0.6430	1.37419
CASH	147	0.00	0.07	0.0121	0.01297

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian statistik deskriptif data BPR keseluruhan untuk BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah 147 data keuangan perusahaan. Data dummy BPR menunjukkan nilai minimum 0 dengan nilai maksimum 1, nilai rata-rata 0,12 dengan standar deviasi 0,321. Variabel rasio kas (*cash holdings*) menunjukkan nilai minimum 0,00 dengan nilai maksimum 0,07. Nilai rata-rata *cash holdings* sebesar 0,012 dengan standar deviasi sebesar 0,012. Variabel likuiditas memiliki nilai minimum 0,00 dengan nilai maksimum 9,14. Nilai rata-rata variabel likuiditas 0.012 dengan standar deviasi 0,012.

**Hasil Uji Beda**

Hasil pengujian data keseluruhan untuk BPR konvensional dan BPR syariah di Kabupaten Magetan dan Ponorogo tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Mean Rank BPR Kabupaten Magetan dan Ponorogo

Variabel	DUMMYBPR	N	Mean Rank	Sum of Ranks
LIQ	BPR Konvensional	130	81.55	10601.00
	BPR Syariah	17	16.29	277.00
	Total	147		
CASH	BPR Konvensional	130	70.20	9126.00
	BPR Syariah	17	103.06	1752.00
	Total	147		

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3. Uji Beda BPR Kabupaten Magetan dan Ponorogo

Parameter	LIQ	CASH
Mann-Whitney U	124.000	611.000
Wilcoxon W	277.000	9126.000
Z	-5.942	-2.992
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000	0.003

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Data penelitian secara keseluruhan menunjukan bahwa terdapat 147 total data rasio likuiditas BPR di Kabupaten Magetan dan Kabupaten

Ponorogo dengan rincian 130 data BPR konvensional dan 17 data BPR syariah. Hasil uji beda rasio likuiditas perusahaan pada tabel 5.10 untuk BPR konvensional dan BPR syariah di Kabupaten Magetan dan Ponorogo menunjukkan bahwa rasio likuiditas berupa *current ratio* menunjukkan nilai sig (2-tailed) menunjukkan nilai p sebesar 0.000 sedangkan rasio likuiditas berupa *cash holdings* menunjukkan nilai sig (2 tailed) menunjukkan nilai p sebesar 0.003. Pengujian rasio likuiditas baik *current ratio* dan *cash holdings* menunjukkan adanya perbedaan rasio likuiditas yang signifikan antara BPR konvensional dan BPR syariah di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo.

Hasil *mean rank* pada tabel 5.11 menunjukkan bahwa secara keseluruhan *current ratio* BPR konvensional lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPR Syariah, sedangkan rasio kas perusahaan (*cash holdings*) menunjukkan BPR syariah di Kabupaten Magetan dan Ponorogo memiliki rasio kas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPR Syariah. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji beda rasio likuiditas BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal likuiditas antara BPR Konvensional dan BPR Syariah. BPR konvensional memiliki rasio *current rasio* yang lebih tinggi jika dibandingkan BPR Syariah sedangkan BPR syariah memiliki rasio kas yang lebih tinggi jika dibandingkan BPR Konvensional.

**Pembahasan**

KOP BPR Takeran dan KOP BPR Mulyo Harjo yang memiliki rasio likuiditas rata-rata di atas rata-rata industri. Dua BPR tersebut tentunya menjadi BPR yang paling tinggi rasio likuiditasnya jika di bandingkan dengan BPR lain di Kabupaten Magetan. Hal yang perlu dicermati adalah kondisi likuiditas BPR Syariah Magetan. BPR syariah sebagai BPR yang masih baru tingkat likuiditasnya masih rendah yaitu masih di bawah 10%. BPR yang lain yaitu PT. Buana Citra Sejahtera dan PT BPR Artha Dharma Magetan meski rasio likuiditasnya masih di bawah rata-rata industri namun nilai rasio sudah di atas 10%, bahkan untuk PT BPR Artha Dharma Magetan sudah di atas 20%.

Jika dilihat dari tingkat kesehatannya tentu yang perlu mendapatkan perhatian adalah BPR Syariah Magetan yang masih ada di area yang kurang aman. Laporan laba rugi pada BPR Syariah Magetan masih mengalami kerugian pada awal kegiatan operasinya. Apabila pada tahun-tahun berikutnya kinerja dari BPR

Syariah Magetan tidak mengalami peningkatan maka ada kemungkinan BPR ini menjadi BPR yang tidak sehat pada periode-periode berikutnya. Pihak manajemen BPR Syariah Magetan harus berupaya meningkatkan kinerjanya agar BPR syariah Magetan tidak mengalami financial distress pada periode berikutnya.

Rasio likuiditas BPR di Kabupaten Ponorogo termasuk tinggi jika dibandingkan dengan di Kabupaten Magetan. Rata-rata rasio likuiditas BPR di Ponorogo mencapai 0.938. Rasio likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT. BPR Artha Ponorogo sebesar 4.300. Hal ini berarti nilai hutang yang jatuh tempo pada tahun berjalan 4 kali lipat jika dibandingkan dengan kas yang dimiliki. Hal ini tentu berbahaya karena nilai kas dan setara kas yang dimiliki oleh BPR tidak cukup untuk melunasi hutang jangka pendeknya. BPR Artha Ponorogo disarankan untuk meningkatkan nilai rasio kas dan setara kas yang dimiliki atau meningkatkan pengelolaan aktiva lancar yang dimiliki BPR agar perputaran aktiva lancar dapat menutup hutang perusahaan yang jatuh tempo. Dengan upaya tersebut diharapkan BPR Artha Ponorogo tetap menjadi bank dengan keuangan yang sehat serta terhindar dari financial distress.

Dengan melihat tingginya rata-rata rasio likuiditas di Ponorogo peneliti melihat ada geliat bisnis yang tinggi dalam industri BPR di Ponorogo. Namun demikian, perlu di waspadai bahwa nilai hutang jangka pendek yang jatuh tempo dan harus segera dilunasi oleh pihak BPR harus tercover oleh nilai kas dan setara kas yang dimiliki oleh BPR. Atau alternatif lain, pengelolaan modal kerja harus baik, dalam artian perputaran aktiva lancar harus terkontrol dan nilainya harus mampu menutup nilai hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka BPR akan mengalami kesulitan likuiditas di mana tidak tersedia dana yang cukup untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Hal ini dapat berbahaya karena dapat merugikan konsumen dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang untuk menggunakan jasa BPR.

#### 4. KESIMPULAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada data rasio keuangan pada BPR konvensional dan BPR Syariah untuk analisis di Kabupaten Magetan dan Ponorogo dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal rasio likuiditas BPR konvensional dan BPR Syariah di Kabupaten

Magetan dan Ponorogo dimana BPR konvensional memiliki rasio likuiditas (current ratio) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPR Syariah. 2) Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal rasio kas (*cash holdings*) BPR konvensional dan BPR Syariah di Kabupaten Magetan dan Ponorogo. BPR konvensional memiliki rasio kas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan BPR Syariah di Kabupaten Magetan dan Ponorogo. 3) Secara umum kondisi kesehatan BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo dalam keadaan baik. BPR yang perlu mendapatkan perhatian adalah BPR Syariah Magetan yang disebabkan aktivitas operasional BPR yang masih saja mengalami kerugian selama beberapa periode pelaporan. Untuk BPR di Kabupaten Ponorogo PT. BPR Artha Ponorogo perlu mendapatkan perhatian yang disebabkan nilai rasio hutang jangka pendek yang lebih besar jika dibandingkan dengan kas dan setara kas yang dimiliki oleh BPR. 4) BPR Syariah Magetan dan PT. BPR Artha Ponorogo perlu segera untuk meningkatkan kinerja operasionalnya agar tetap menjadi BPR dengan keuangan yang sehat dan terhindar dari financial distress pada periode-periode yang akan datang.

##### Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penelitian ini hanya dilakukan pada BPR syariah dan Konvensional yang ada di Kabupaten Megetan dan Ponorogo sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk mengeneralisir hasil untuk seluruh BPR Syariah dan Konvensional. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan umur BPR sebagai salah satu pertimbangan untuk menentuka fase atau siklus hidup yang saat ini sedang dijalani BPR. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kembali perbandingan rasio keuangan antara BPR konvensional dari sisi rasio keuangan yang lain semisal rasio kecukupan modal atau rasio profitabilitas perusahaan. Penelitian selanjutnya disaran untuk menguji perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada level bank nasional.

#### 5. REFERENSI

- Anwar, Choirul. 2010. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah Di Surakarta. Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret: Tidak dipublikasikan.
- Astuti, Sih Darmi dan Bambang Sudyatno. 1995. Krisis Likuiditas Perbankan. Gema Stikubank. pp.63-73.

- Badrul Hisham Kamaruddin, Mohammad Samaun Safa dan Rohani Mohd. 2008. Assessing Production Efficiency of Islamic Banks and Conventional Bank Islamic Windows in Malaysia. *International Journal of Business and Management Science*, 1(1): 31-48, 2008
- Hamdan, Umar dan Andi Wijaya. 2006. Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional Dan BPR Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.4, No.7.
- Harahap, Rudi Dogar. 2010. Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah. Asbanda Human Resource Development Center (AHRDC).
- Herri; Tafdil Husni; Syahrial S; Suhairi; Edi Herman; dan Ma'ruf. 2008. Studi Peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat. *Center for Banking Research*, Universitas Andalas.
- Ika, Siti Rochmah dan Nohayati Abdullah. 2011. A Comparative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks In Indonesia. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No. 15; August 2011.
- Ismal, Rifki. 2009. Model Of Islamic Monetary Operation For Liquidity Management In Islamic Banking Case Of Indonesia 2000-2009. *Gadjah Mada International Journal of Business* May-August 2009. Vol. 11, No. 2. pp. 149-16.5.
- Islamiyah, Azizatul. 2010. Analisis Manajemen Kredit untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT BPR Gunung Ringgit Malang). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jikrillah, Sufi. 2010. Pemetaan Profil Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 11, No.1
- Kaseleran, Preisy Valentina. 2013. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pada PT Bank BPR Millenia Berdasarkan PSAK. No.23. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No.3.
- Margaretha, Farah dan Diana Setyaningrum. 2011. Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 13, No. 1, Mei 2011: 47-56
- Muhammad, Rifqi dan Peni Nugraheni. 2011. "Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Bagi SDI Perbankan Syariah Indonesia". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Dunia Pendidikan ekonomi, Manajemen dan akuntansi dalam penguatan perekonomian bangsa di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Santoso, Singgih. 2006. *Menggunakan SPSS untuk Statistik Non Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Siebel, Hans Dieter. 2008. Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision. *SOJOURN. Journal of Social Issues in Southeast Asia*. Vol. 23, No. 1 (2008), pp. 86
- Siregar, Mulya. 2002. Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*. Vol. 3, No. 1, pp. 46-66
- Syathiri, Ahmad. 2009. Assets-Liabilities Management: Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional. *EKBISI*, Vol. 4 Nomor 1, pp. 35-51
- Yuniarti, Sari. 2011. Strategi Adaptif Bank Perkreditan Rakyat dalam Menghadapi Ekspansi Kredit UMKM Bank Umum di Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3.